AGILE GOVERNANCE: RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PEMBERITAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DI MEDIA MASSA TAHUN 2022

Oleh : Oki Oktafandi
Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si.
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In mid-2022, the Regional Government of Indragiri Hilir Regency faced a wave of criticism in the media regarding damaged public infrastructure, specifically the bridge on Section 17 in Sungai Piring, the bridge on Section 11 in Tekulai Hilir Village, the bridge on Section 43 in Igal Village, and Terusan Mas Parit 18 Road. This study applies agile governance theory to analyze each step taken by the Indragiri Hilir Regency government. The research method employed is qualitative, with a descriptive explanation. The types of data used include primary data, obtained from research informants, and secondary data, collected from relevant documents that support the study. The research location is within the Government environment of Indragiri Hilir Regency.

The study results indicate that the Indragiri Hilir Regency government responded to public complaints about damaged infrastructure in 2022 mostly in line with the indicators of agile governance theory, though improvements and evaluations are still needed, particularly for the indicator of simple design and continuous refinement. The based on quick wins indicator focuses on the Regency government's swift response, from the onset of media reports to the completion of infrastructure repairs. The business-driven indicator emphasizes the government's financial management ability in repairing the four pieces of public infrastructure. Good enough governance focuses on the local government's communication strategy through social media to maintain public trust despite reports of damaged infrastructure. The human-focused indicator examines public participation, analyzing the power of community concern through media advocacy. Simple design and continuous refinement centers on the approach to reporting damaged infrastructure and implementing a simplified digital reporting design. The systematic and adaptive approach focuses on the systematic and adaptive steps taken by the government to prevent public infrastructure damage, particularly bridges and roads.

Keywords: *Agile Governance, Response, Public Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan sangat penting bagi masyarakat karena pemerintah merupakan lembaga penting dalam entitas suatu negara. Menurut (Pratiwi et al., 2023) saat ini masyarakat di suatu negara sangat menginginkan pola kinerja pemerintahan yang simpel sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintahan tersebut. Akibat adanya suatu tuntutan dari masyarakat maka pemerintah harus melakukan inovasi dan adaptasi agar mampu mewujudkan pemerintahan yang baik.

Aspek penting dalam pemerintahan menurut (Apriliyanti et al., 2021) adalah bagaimana cara pemerintah dalam merespons setiap aduan, aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Hal tersebut penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat merupakan pemegang kedaulatan di suatu negara sehingga peranan masyarakat memang sangat penting dalam jalannya pemerintahahan. Respons pemerintah terhadap setiap aduan masyarakat harus ditindak lanjuti agar pelaksana pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Konsep *agile governance* hadir menjadi sebuah solusi untuk melihat dan menganalisis tentang bagaimana respons dan tindak lanjut pemerintah terhadap perubahan dan desakan yang ada. *Agile governance* merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang gesit sehingga menyajikan kebijakan publik yang responsif dan efisien. Menurut (Suryani & Diniawaty, 2024) urgensi dalam penerapan konsep *agile governance* sendiri adalah karena banyak pemerintah, instansi, dan dinas-dinas yang masih dinilai lamban terhadap perubahan dan desakan sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pemerintahan telah didorong untuk menerima setiap aspirasi masyarakat yang ada disetiap media massa (Yusril et al., 2024). Penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan efisien. Dalam aturan tersebut juga termuat juga tentang pemerintah yang harus semakin terbuka dalam menjalankan pemerintah dengan memanfaatkan perkembangkan teknologi dengan tujuan semakin dapat melibatkan masyarakat sebagai *controlling* dan penerima pelayanan. Selain itu juga dijelaskan bahwa pemerintah harus merespons setiap perubahan dengan prinsip *quick wins*, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan merespons aduan dari masyarakat

Tabel 1 Rekap Infrastruktur Rusak di Media Massa Tahun 2022

NO	INFRASTRUKTUR RUSAK	TANGGAL RILIS
1.	Jembatan di Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka	28 April 2022
2.	Jembatan di Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah	03 April 2022
3.	Jembatan di Desa Igal, Kecamatan Mandah	19 Juli 2022
4.	Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan	19 Juli 2022

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Pada tahun 2022, terdapat empat pemberitaan terkait kerusakan infrastruktur publik di media massa. Keempat infrastruktur publik tersebut adalah Jembatan pada Ruas 17 Sungai Piring di Kecamatan Batang Tuaka, Jembatan pada ruas 43 Desa Igal di Kecamatan Mandah, Jembatan pada Ruas 11 Desa Tekulai Hilir, dan Jalan Terusan Mas Parit 18 di Kecamatan Tembilahan.

Keempat infrastruktur publik tersebut tersebar di berbagai wilayah utara hingga selatan Kabupaten Indragiri Hilir. Masing-masing infrastruktur di atas merupakan bagian penting bagi masyarakat karena merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat karena memiliki peranan vital dalam menghubungkan berbagai wilayah dan mendukung aktivitas sehari-hari. Infrastruktur tersebut memudahkan mobilitas orang dan barang, memungkinkan akses yang cepat dan efisien dari satu tempat ke tempat lain. Maka dari itu pemerintah daerah harus cepat untuk melakukan perbaikan pada empat inftastruktur publik

Gambar 1 Berita Kerusakan Jembatan Ruas 17 Sungai Piring

Sumber: Antara News, 2022

Jembatan pada Ruas 17 di Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, mengalami kerusakan serius pada konstruksinya hingga

melengkung, yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat. Dengan panjang 36 meter dan lebar 3 meter, jembatan ini merupakan jalur penghubung utama antara Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Gaung Anak Serka, sehingga kondisi kerusakannya segera menjadi sorotan, terutama di media massa. Keadaan jembatan yang melengkung menimbulkan potensi risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan menuntut perhatian cepat dari pihak berwenang untuk memastikan kelancaran serta keamanan lalu lintas di kawasan tersebut.

Gambar 2 Berita Kerusakan Jembatan Ruas 11 Desa Tekulai Hilir

Sumber: Arrayan.co, 2022

Jembatan di Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, yang mengalami kerusakan menjadi perhatian publik dan diliput media massa pada tahun 2022. Dengan panjang kerusakan mencapai 110 meter dan lebar 2,5 meter, kondisi jembatan ini memprihatinkan, terutama karena jembatan tersebut berperan penting bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Kerusakan ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada aksesibilitas layanan dan ekonomi di wilayah tersebut, sehingga perbaikan segera sangat dibutuhkan untuk memastikan jembatan dapat kembali digunakan dengan aman. Masyarakat Tekulai Hilir sering melintasi jembatan ini untuk menuju dermaga. Selain itu, jembatan ini juga menjadi penghubung utama antara area pemukiman masyarakat dengan kantor desa Tekulai Hilir, tempat untuk melakukan berbagai urusan administrasi. Dengan kondisi jembatan yang mengalami kerusakan, akses masyarakat terganggu dan meningkatkan risiko keselamatan warga, sehingga perbaikan jembatan sangat penting untuk menunjang kelancaran mobilitas.

Gambar 3 Berita Kerusakan Jembatan Ruas 43 Desa Igal

Sumber: Viva.co, 2022

Jembatan pada Ruas 43 di Desa Igal, Kecamatan Mandah, menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas di media massa pada tahun 2022. Pertama kali diberitakan pada 19 Juli 2022, jembatan ini mengalami kerusakan serius sepanjang 900 meter dengan lebar 2,5 meter. Kondisinya yang membahayakan pengguna jalan membuatnya viral hingga mencapai media nasional, bahkan mendapat julukan "jembatan sakaratul maut". Sebagai penghubung utama antara Kecamatan Mandah dan Kecamatan Gaung, jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat setempat dalam mendukung mobilitas sehari-hari.

Kondisi yang rusak parah menuntut perhatian segera agar akses warga dapat kembali berjalan aman dan lancar. Jembatan tersebut merupakan akses masyarakat menuju dermaga utama yang ada di Kecamatan Mandah sehingga masyarakat sering menggunakan jembatan tersebut untuk melintas. Jembatan tersebut merupakan akses masyarakat menuju dermaga utama yang ada di Kecamatan Mandah sehingga masyarakat sering menggunakan jembatan tersebut untuk melintas.

Gambar 4 Berita Kerusakan Jalan Terusan Mas Parit 18

Sumber: KarimunToday.com, 2022

Jalan Terusan Mas Parit 18 di Kecamatan Tembilahan juga menjadi salah satu infrastruktur publik yang mendapat sorotan media pada tahun 2022. Kondisi jalan yang rusak pertama kali diberitakan pada 19 Juli 2022, mengungkap kerusakan sepanjang 500 meter yang ditandai dengan banyaknya lubang di sepanjang ruas jalan tersebut. Terletak di ibu kota kabupaten, Jalan Terusan Mas Parit 18 merupakan akses penting yang sering digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas tetapi juga menimbulkan risiko bagi pengguna jalan, terutama pengendara roda dua. Kondisi jalan yang berlubang-lubang membutuhkan penanganan segera agar jalan dapat kembali layak dan aman digunakan oleh masyarakat sekitar.

Media seperti Antara Riau.com dan Berita Riau.com yang turut menerbitkan pemberitaan tentang rusaknya infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Masing-masing dari pemberitaan tersebut dirilis dalam tahun yang sama sehingga menunjukan bahwa permasalahan tersebut aktual. Dalam isi berita menggambarkan bagaimana parahnya kerusakan yang ada pada keempat infrastruktur publik yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga menarik pembaca dan media lain untuk ikut membagikan berita tersebut.

Tabel 2 Rekap Media Massa Penerbit Berita Infrastruktur Publik Rusak di INHIL Tahun 2022

NO	MEDIA MASSA		
1	Kompasiana	19	Koran-Jakarta
2	DetikNews	20	Indonesia Kini
3	BeritaOne.id	21	Viral Utama
4	ANTARA News Riau	22	Kabar Investigasi
5	HebatRiau	23	Posmetro Indragiri
6	IndragiriOne	24	Riau Peristiwa
7	PotretNews	25	Detik News
8	BeritaRiau	26	Medcom.id
9	RiauTribune	27	RiauSky.com
10	KataKata.id	28	Kundur News
11	InfoRiau.com	29	Lintas Tungkal
12	Pelita Riau	30	Kilas Riau
13	Kompas.com	31	Go Riau
14	CNN Indonesia	32	Hallo Riau
15	RiauTerkini	33	Sumatera Pena
16	Harian Riau	34	Bualbual.com
17	Riau Aktual	35	WajahBangga.com
18	Selat Panjang Pos	36	BeritaTerkini.com

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas tergambar bagaimana *power* masyarakat dalam mengadvokasikan aduan tentang rusaknya infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022. Terlihat bukan hanya media massa yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir saja yang merilis berita rusaknya infrastruktur publik tersebut melainkan media massa yang ada di berbagai daerah. Dengan adanya lebih dari 35 media massa yang meliput rusaknya infrastruktur publik tersebut tentu akan semakin menarik atensi publik lainnya bahkan masyarakat luar Kabupaten Indragiri Hilir untuk ikut berparisipasi dalam menyampaikan aduan tersebut sehingga terbentuk pola penyampaian kritik atau aktivitas advokasi melalui media massa yang secara kolekif terjadi karena adanya kesamaan keresahan dikalangan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab untuk memberikan respons terhadap setiap aduan masyarakat di media massa. Responsivitas pemerintah sangat diperlukan terutama terhadap aduan-aduan masyarakat terkait infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat. Maka dari itu pada penelitian ini akan menganalisis tentang respons pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan melihat kebijakan publik baik mulai dari proses respons, perencanaan, penganggaran, dan pembangunan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di lihat rumusan masalah yaitu bagaimana respons pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam perspektif *agile governance* terhadap pemberitaan infrastruktur publik di media massa pada tahun 2022?

KERANGKA TEORITIS

1. *Agile Governance*

Menurut (José et al., 2015) konsep *agile* hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru. *Agile Governance* diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Konsep *agile* hadir untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Pada era digitalisasi, konsep ini mampu untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan dari perubahan lingkungan. *Agile* adalah software, dan membutuhkan sumber daya manusia yang visioner serta inovatif secara esensial (mudah, cepat, unggul).

Setidaknya terdapat dua hal yang mengharuskan pemerintahan tata kelola harus dibuat gesit yang pertama adanya perubahan lingkungan,

hal ini terjadi apabila lingkungan berubah sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan adaptasi secara gesit. Kedua adalah desakan dari masyarakat, hal ini penting karena pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat artinya proses respons yang gesit dari pemerintah merupakan awalan penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance).*

Menurut (José et al., 2015) dalam indikator *agile governance* adalah sebagai berikut:

1) *Based on Quick Win*
   Berdasarkan program percepatan *(based on quick win)* yaitu kesuksesan yang dicapai dibanding dengan cara yang konvensional dengan cepat serta dimanfaatkan lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang maksimal.
2) *Business Driven*
   Berorientasi pada bisnis (*business driven)* yaitu pendekatan dalam merespons suatu perubahan dan desakan tetap berlandaskan pada prinsip ekonomi yang luas dan inovatif sehingga lebih hemat biaya dan hemat waktu.
3) *Good Enough Governance*
   Tata kelola yang cukup baik *(good enough governance)* yaitu suatu organisasi harus mengembangkan kemampuan intrinsik dalam menghadapinya dengan perubahan sistematis agar dapat bekerja secara responsif dan bukan pasif.
4) *Human Focused*
   Berfokus pada masyarakat *(Human focused)* yaitu masyarakat perlu dilibatkan untuk berpartisipasi karena merupakan elemen kunci perubahan dan kekuatan pendorong bagi organisasi.
5) *Simple Design and Continuous Refinement*
   Desain sederhana dan perbaikan berkelanjutan *(Simple design and continuous refinement)* yaitu mengacu pada pendekatan di mana pemerintah merancang sistem yang sederhana namun efektif, serta berkelanjutan dengan perbaikan yang terus-menerus. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk menciptakan desain layanan publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat luas, seperti memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pelayanan dan pengaduan.
6) *Systematic and Adaptive Approach*
   Sistematis dan adaptif *(Systematic and adaptive*

approach) yaitu mengacu pada strategi pemerintah dalam merancang perencanaan yang preventif dan responsif, khususnya dalam pemeliharaan infrastruktur publik seperti jembatan dan jalan. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga memprioritaskan langkah-langkah pencegahan untuk menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengum-pulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan obser-vasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan doku-menter yang terkait respons Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemberitaan infrastruktur publik di media massa tahun 2022.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan terkait respons Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemberitaan infrastruktur publik di media massa tahun 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Based on Quick Wins* (Berdasarkan Program Percepatan)

Tabel 3 Waktu Pemberitaan dan Awal Pengerjaan Empat Jembatan

No	Infrastruktur Publik	Waktu	
		Awal Pemberitaan	Awal Pengerjaan
1.	Jembatan di Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka	28 April 2022	16 Mei 2022
2	Jembatan di Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah	03 April 2022	08 Agustus 2022
3.	Jembatan di Desa Igal, Kecamatan Mandah	19 Juli 2022	25 Juli 2022
4.	Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan	19 Juli 2022	07 September 2023

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan data mengenai perbaikan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa proyek perbaikan jembatan dan jalan telah dilaksanakan setelah muncul pemberitaan di media massa terkait kondisi kerusakan. Proyek pertama adalah Jembatan Ruas 17 di Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, yang pertama kali diberitakan pada 28 April 2022 dan mulai dikerjakan pada 16 Mei 2022. Selanjutnya,

Jembatan di Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, diberitakan mengalami kerusakan pada 3 April 2022 dan pengerjaannya dimulai pada 8 Agustus 2022. Sementara itu, Jembatan pada Ruas 43 di Desa Igal, Kecamatan Mandah, mulai diberitakan pada 19 Juli 2022 dan pengerjaannya dilaksanakan dengan cepat, dimulai pada 25 Juli 2022. Terakhir, proyek perbaikan Jalan Terusan Mas di Parit 18, Kecamatan Tembilahan, yang diberitakan pada 19 Juli 2022, mulai dikerjakan pada 7 September 2022. Penanganan proyek ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam merespons laporan kerusakan infrastruktur dengan penjadwalan pengerjaan yang beragam berdasarkan prioritas dan kondisi lapangan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jembatan dan jalan di empat daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas PUTR mengimplementasikan indikator *business driven* (berorientasi pada bisnis) dalam perbaikan infrastruktur publik dengan mengedepankan perencanaan skala prioritas. Melalui pendekatan ini, perbaikan dilakukan secara bertahap, yakni tiga jembatan yaitu Jembatan Sungai Luar, Jembatan Desa Igal, dan Jembatan Tekulai Hilir dipilih untuk perbaikan semi permanen yang dilaksanakan secara swakelola, sedangkan Jalan Terusan Mas diperbaiki secara permanen. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas proyek yang mendesak dan mengatur perbaikan yang dapat menunggu hingga tahun anggaran berikutnya, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal dan efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya pembangunan ini diharapkan dapat mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas aksesibilitas di berbagai wilayah Indragiri Hilir. Pertimbangan penganggaran tersebut dilakukan berlandaskan pada skala prioritas dan pertimbangan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2022.

2. *Business Driven* (Berorienasi pada Bisnis)

3. ***Good Enough Governance*** **(Tata Kelola yang Cukup Baik)**

Gambar 5 Rekap Berita Progres Perbaikan Infrstruktur Publik di Media Center Indragiri Hilir

Sumber: Media Center Indragiri, 2022

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Pemkab INHIL aktif untuk meliput setiap progres yang dilakukan dalam perbaikan infrastruktur publik. Pada berita tentang progres perbaikan jembatan di Sungai Piring dan Jalan Terusan Mas, terlihat Pemkab INHIL memberitakan mulai dari tahap peninjauan, progres pengerjaan, hingga selesainya pengerjaan perbaikan. Hal tersebut penting dilakukan agar menunjukan keseriusan pemerintah dalam merespons dan memperbaiki setiap tuntutan masyarakat terutama terkait kerusakan infrastruktur publik. Selain itu pada berita jembatan di Sungai Pinggan terlihat bahwa pemerintah melakukan *update* progres pengerjaan yang mereka lakukan, dalam *headline* berita tersebut disebutkan bahwa penanganan Jembatan Sungai Pinggan mencapai 55 persen. Lalu pada berita Jembatan di Desa Igal terlihat bahwa pemerintah menyebarkan informasi bahwa pengerjaan jembatan tersebut telah selesai dan meminta masyarakat untuk dapat bersama-sama merawat infrastruktur publik tersebut dengan baik.

4. ***Human Focused*** **(Berfokus pada Masyarakat)**

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, pengerjaan tiga jembatan yaitu Jembatan Sungai Luar, Jembatan Desa Igal, dan Jembatan Tekulai Hilir dilakukan secara swakelola tersebut menggunakan tipe 4 yang artinya pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan jembatan tersebut. Hal tersebut selaras dengan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang mengatakan bahwa pemerintah terdapat empat tipe dalam pengadaan barang/jasa dari pemerintah salah satu tipe 4 yang mana pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai pekerja.

Perbaikan tiga jembatan yaitu Jembatan Sungai Luar, Jembatan

Desa Igal, dan Jembatan Tekulai Hilir dilakukan secara semi permanen melalui metode swakelola. Langkah ini mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yang menjelaskan empat tipe pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu dari keempat tipe tersebut, yakni Tipe 4, memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek. Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak hanya dapat mempercepat proses perbaikan dengan memberdayakan masyarakat lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Pendekatan swakelola ini pun dinilai lebih efisien dan dapat menekan biaya proyek karena melibatkan masyarakat sekitar sebagai pelaksana langsung, yang juga berpotensi meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang diperbaiki.

Selain itu berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dari salah satu masyarakat Desa Igal mengatakan bahwa senang dengan adanya perbaikan jembatan tersebut karena selain masyarakat ikut dilibatkan dalam proses perbaikan sebagai pekerja, masyarakat yang lain juga kini dapat menggunakan akses jembatan tanpa ada rasa khawatir akan terjadi kecelakaan karena sudah dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Dan salah satu masyarakat dari Kelurahan Tembilahan Hilir yang dekat dengan Jalan Terusan Mas juga mengatakan bahwa perbaikan Jalan Terusan Mas disambut dengan rasa syukur oleh masyarakat sekitar yang selama ini mengalami banyak kesulitan akibat kondisi jalan yang rusak. Sebelumnya, lubang-lubang di jalan tersebut sering kali tergenang air saat hujan, membuatnya berbahaya dan sulit dilalui oleh pengendara.

5. *Simple Design And Continuous Refinement* (Desain Sederhana dan Perbaikan Berkelanjutan)

Dalam alur pengaduan kerusakan infrastruktur publik oleh Dinas PUTR INHIL pada bagian mekanisme dan prosedur dikatakan bahwa masyarakat nantinya harus membuat laporan yang berisikan dokumentasi berupa foto serta ditambahkan keterangan titik koordinat lokasi kerusakan infrastruktur publik tersebut. Setelah laporan tersebut selesai, nantinya pemohon yang dalam hal ini merupakan masyarakat harus mengirim laporan tersebut ke kantor Dinas PUTR INHIL yang ada di Kecamatan Tembilahan. Dalam konteks *simple design and continuous refinement* tentu ini tidak efektif karena desain pengaduan masyarakat masih secara konvensional.

Keempat infrastruktur publik yang menjadi fokus penelitian hanya Jalan Terusan Mas yang berada di dekat dengan Kecamatan

Tembilahan daerah kantor Dinas PUTR INHIL berada. Ketiga infrastruktur publik lainnya yaitu Jembatan di Sungai Piring, Desa Tekulai Hilir dan Desa Igal memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan Tembilahan. Jarak antara Sungai Piring dengan Tembilahan 21 km, sedangkan untuk Desa Tekulai Hilir berjarak 17,5 km, dan Desa Igal berjarak 52 km ke Tembilahan. Dengan jauhnya jarak tersebut tentu akan menghambat pengaduan yang akan dilakukan oleh masyarakat jika desain pengaduan dilakukan secara konvensional atau harus dilakukan di kantor.

***6. Systematic and Adaptive Approach* (Sistematis dan Adaptif)**

Tabel 6 Strategi Pemeliharaan Infrastruktur Publik

NO	Daerah	Strategi *Grey Structure*	Strategi *Green Structure*	Strategi *Non Structure*
1.	Kelurahan Sungai Piring	• Pembersihan Drainase • Rehabilitasi Infrastruktur	• Penghijauan	• Pengelolaan Sampah • Pemberdayaan Masyarakat
2.	Desa Tekulai Hilir	• Normalisasi Parit • Pemeliharaan Infrastruktur	• Rehabilitasi Mangrove • Restorasi Tanah Gambut	• Pengawasan Infrastruktur Publik
3.	Desa Igal	• Normalisasi Parit • Pembangunan Drainase	• Penghijauan • Manajemen Ekosistem Gambut	• Pengawasan Infrastruktur Publik
4.	Kelurahan Tembilahan Hilir	• Pembersihan Drainase • Pemeliharaan Infrasturktur	• Penghijauan	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengelolaan Sampah

Sumber: BAPPEDA INHIL, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pemkab INHIL melakukan adaptasi dari secara sistematis dengan membuat kebijakan preventif untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur publik terutama pada empat daerah yang ada seperti Sungai Piring, Desa Tekulai Hilir, Desa Igal, dan Kelurahan Tembilahan Hilir. Rencana perbaikan lingkungan dan infrastruktur di beberapa wilayah ditargetkan melalui tiga kategori utama: *grey structure*, *green structure*, dan *non structure*. Di Kelurahan Sungai Piring, program *grey structure* meliputi pembersihan drainase dan rehabilitasi infrastruktur, dengan *green structure* berfokus pada penghijauan, serta *non*

structure pada pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Tekulai Hilir, rencana *grey structure* mencakup normalisasi parit, sementara *green structure* diarahkan pada penanaman dan rehabilitasi mangrove serta restorasi tanah gambut; program *non structure* melibatkan pengawasan infrastruktur publik. Desa Igal mengadopsi rencana *grey structure* berupa normalisasi parit, pembangunan drainase, dan pembangunan dermaga untuk mendukung distribusi bahan perbaikan infrastruktur. Rencana *green structure* di Desa Igal berfokus pada penghijauan dan manajemen ekosistem gambut, dengan pengawasan infrastruktur publik sebagai komponen *non structure*. Di Kelurahan Tembilahan Hilir, rencana *grey structure* mencakup pembersihan dan pelebaran drainase serta pemeliharaan infrastruktur, sementara *green structure* mendukung penghijauan, dan *non structure* berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari penelitian *Agile Governance:* Respons Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pemberitaan Jembatan Rusak di Desa Igal Tahun 2022. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam indikator *based on quick,* pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas PUTR merespons pemberitaan infrastruktur rusak dengan gesit. Pada Jembatan pada Ruas 17 Sungai Piring awal pemberitaan pada tanggal 28 April 2022 dan respons awal pengerjaan perbaikan pada 16 Mei 2022. Untuk Jembatan pada Ruas 11 Desa Tekulai Hilir awal pemberitaan jembatan rusak pada 03 April 2022 dan awal pengerjaan perbaikan pada 08 Agustus 2022. Selanjutnya Jembatan pada Ruas 43 Desa Igal awal pemberitaan jembatan rusak pada 19 Juli 2022 dan awal pengerjaan perbaikan pada 25 Juli 2022. Dan terakhir Jalan Terusan Mas Parit 18 pemberitaan jalan rusak pada 19 Juli 2022 dan awal pengerjaan perbaikan pada 07 September 2022. Ketiga jembatan dilakukan perbaikan semi permanen sedangkan Jalan Terusan Mas dilakukan rekontruksi permanen. Hal tersebut mencerminkan program percepatan yang pemerintah daerah terapkan karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya.
2. Lalu dari segi indikator *business driven* pemerintah juga mampu menunjukan kemampuan manajerial keuangan yang baik dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat dan membeli alat beserta bahan yang ada di dekat daerah infrasturktur publik tersebut.

3. Pada indikator *good enough goverance* pemerintah daerah bersama-sama dengan Bupati mencoba membangun komunikasi melalui media massa agar memberikan informasi terkait progres perbaikan keempat infrasturktur publik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat akibat kritik yang pemerintah daerah terima.
4. Pada indikator *human focus* melihat *power* dari partisipasi masyarakat yang besar hingga pemberitan jembatan rusak tersebut dirilis hingga 35 media massa dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memperbaiki jembatan tersebut. Masyarakat yang ada di sekitar empat infrasturktur publik tersebut merasakan dampak dari perbaikan jembatan dan jalan karena semakin mudah untuk beraktivitas serta menjadi akses mobilitas antar desa sekitar. Selain itu ketiga jembatan yang dilakukan perbaikan secara swakelola, masyarakat diikutsertakan dalam proses perbaikan sebagai pekerja.
5. Pada indikator *simple design and continuous refinement* Pemkab INHIL masih menggunakan desain pelayanan secara konvensional khususnya terkait pengaduan masyarakat untuk melaporkan adanya infrastruktur publik yang rusak. Alur pengaduan yang diberikan oleh Dinas PUTR adalah dengan metode pelaporan fisik menggunakan surat yang mana surat tersebut dikirimkan ke kantor Dinas PUTR yang ada di Tembilahan. Hal tersebut membuat masyarakat yang berada jauh dari Tembilahan kesulitan untuk melaporkan kerusakan infrastruktur publik. Selain itu diketahui bahwa Dinas PUTR tidak memanfaatkan digitalisasi sebagai instrumen untuk menerima pengaduan dilihat dari websitenya yang tidak dapat diakses serta tidak aktifnya akun media sosial seperti *instagram.*
6. Dan pada indikator *systematic and adaptive approach* Pemkab INHIL melakukan strategi preventif dengan baik untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya kerusakan pada infrastruktur publik terutama jembatan dan jalan. Pemkab INHIL membuat tiga sistematika adaptasi yang dilakukan pada empat daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur publik. Ketiga strategi tersebut adalah *grey structure* dengan membangun drainase, pembersihan drainase, pelebaran drainse, normalisasi parit, dan pemeliharaan infrastruktur publik. Strategi kedua adalah *green structure* dengan melakukan penghijauan, restorasi tanah gambut, dan rehabilitasi mangrove. Dan strategi ketiga adalah *non structure* dengan melakukan

pemberdayaan masyarakat, pengawasan infrastruktur publik, dan pengelolaan sampah.

SARAN

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan serta perbaikan infrasturktur publik seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA), Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Pembangunan, hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan mulai dari perencanaan yang matang hingga ketersediaan anggaran agar ketika fenomena kritik melalui pemberitaan di media massa terjadi lagi, seluruh organisasi perangkat daerah telah sigap dan mampu merespons pengaduan tersebut dengan suatu kebijakan. Dengan mewujudkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang sigap maka Pemerintah Indragiri Hilir telah menerapkan setiap prinsip-prinsip yang ada pada indikator *agile governance.*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jembatan dan Terowongan Jalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Buku

Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

José, A., De Oliveira, H., & Thesis, L. P. (2015). *Theory of Agile Governance : a step towards business agility*. Federal University of Pernambuco. www.cin.ufpe.br/~posgraduacao

Kusumastuti, A., & Mustamil, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Riyanti, N. (2023). *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik*. Widina Media Utama.

Sulistyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media.

Suprastiyo, A., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2023). *Agile*

Governance: Aplikasi dalam Pelayanan Publik. Widina.

Tagi, M. A. (2014). *Applying Agile Methodologies Within the Context of Traditional Project Governance*. Tekniska Hogskolan.

Jurnal

Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Alia, S., Suparman, N., & Zahra, A. (2022). Penerapan Prinsip Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*.

Amrulloh, C., Putri, F., Rosi, S., Eka, Y., Nilam, G., Pangarso, D., Afifudin, M., Faizi, F., & Haikal, A. (2022). Peran Agile Governance Dalam Optimalisasi Potensi Wisata Berkelanjutan di Kelurahan Nyamplungan. *Communnity Development Journal*.

Apriliyanti, K., Latif, M. D. I., & Mutiarin, D. (2021). Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya. *Jurnal Transformative*, *7*(1), 1–28. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1

Deseve, G. E. (2020). AGILE GOVERNMENT: Driving Change to Achieve Success. *IBM Center for The Business of Government*. www.businessofgovernment.org

Hadi, E. D., & AB, S. A. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Polres Rejang Lebong Terhadap Pengaduan Masyarakat). *Student Journal of Business and …*.

Muttaqin, M. I., & Permatasari, A. (2023). Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *8*(2), 187–201. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875

Padmaningrum. (2021). Penyederhanaan Birokrasi Melalui Agile Governance Menuju Layanan Prima. *Jurnal IKIP Veteran*. http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan

Patianfla, S. V. (2022). Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Publication Article*, *1*(1), 1–9.

Pratiwi, D., Althafah, N., & Khatammi, S. (2023). Pro: Agile Governance Eligible Diterapkan di Era Disruption. In *Pro Kontra Isu Pembangunan*.

Putri, S. B., Husni Tamrin, M., Wahyuni, S., & Rianto, B. (2020). Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik. *Jurnal Intelektual*.

Rahmawan, F., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(1). https://doi.org/10.26618/kjap.v7i1.4913

Riyanti, N. (2023). *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik*. Widina Media Utama.

Setiawan, M. B., & Kumorotomo, W. (2023). Penerapan Agile Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penanganan

Keluhan Melalui Sistem Informasi Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (SI UPIK) di Masyarakat Kota Yogyakarta). *ETD Universitas Gadjah Mada*. http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sulastri, S., & Permatasari, A. (2023). Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transformative*, *9*(2), 187–203. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.4

Suryani, E., & Diniawaty, S. A. (2024). Penyederhanaan Birokrasi : Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju Agile Governance. *Jurnal Publik*, *18*(01), 11–25. https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.325

Vernanda, R. (2019). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance. *Lembaga Administrasi Negara*.

Winata, T. P., Wulan, D. O., & Farhaturrahmah, T. A. (2023). Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *3*(2), 90–105. https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.90-105

Yusril, A., Suwarjo, U., & Kartini, D. (2024). Agile Governance Pemerintah Kota Bogor dalam Pembangunan Transportasi Publik Biskita untuk Mengatasi Kemacetan. *Jurnal Ilmuah Administrasi Publik (JIAP)*.

Zahra, N. S. A., Suparman, N., & Alia, S. (2022). Penerapan Prinsip Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *3*(5), 6167–6178.

Zhafran, M., Pramudita, I., Murti, I., & Rahmadanik, D. (2023). Responsivitas Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Menangani Keluhan Kerusakan Jalan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal 17 Agustus Surabaya*.